

**EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH
STUDI PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DOLOK MASIHUL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

TESIS

OLEH

**FITRIANA SENJA
151801036**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

**EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH
STUDI PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DOLOK MASIHUL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik dalam Program Studi Magister Administrasi Publik pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**FITRIANA SENJA
NPM. 151801036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Evaluasi Program Indonesia Pintar Untuk Siswa
Madrasah Studi Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok
Masihul Kabupaten Serdang Bedagai**

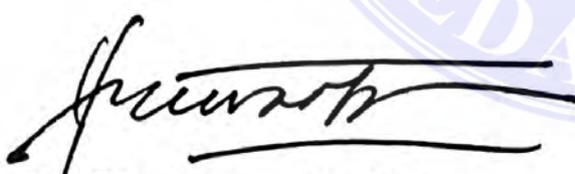
N a m a : Fitriana Senja

N P M : 151801036

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Heri Kusmanto, MA


Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur


Dr. Warjio, MA


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

Telah diuji pada Tanggal 8 Juni 2017

N a m a : Fitriana Senja

N P M : 151801036



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Drs. Usman Tarigan, MS
Sekretaris : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA
Penguji Tamu : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2017

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

TGL 20

B8F95AEF109694415

6000
ENAM RIBURUPIAH



Fitriana Senja
Fitriana Senja

A B S T R A K

EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH Studi Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

N a m a : FitrianaSenja
N P M : 151801036
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr.Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menyelenggarakan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa madrasah. Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar(PIP) pemerintah telah mengeluarkan petunjuk teknis tentang perencanaan, pelaksanaan dan money Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu dengan ditetapkannya Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 Tentang Petujuk Teknis Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2016. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilihat dari aspek kesiapan, pelaksanaan dan pemanfaatan dari Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan responden diambil dari unsur sekolah dan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai pada aspek kesiapan penerima Program Indonesia Pintar secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik, demikian juga dari aspek pelaksanaannya telah berjalan dengan baik. Dari aspek pemanfaatannya termasuk sangat baik. Faktor pendukung Program Indonesia Pintar adalah adanya pendataan siswa sebelum program dilaksanakan sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi dari sekolah kepada siswa. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan Program Indonesia Pintar ini perlu adanya petunjuk teknis dan SOP dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar tersebut.

Kata Kunci : Evaluasi kebijakan, Program Indonesia Pintar (PIP), Madrasah Ibtidaiyah.

ABSTRACT

EVALUATION OF INDONESIA SMART PROGRAM FOR MADRASAH'S STUDENTS

Studies At Dolok Masihul National Madrasah Ibtidaiyah Serdang Bedagai District

Name : Fitriana Senja
NPM : 151801036
Study Program : Master Of Public Administration
Supervisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor II : Drs. Kariono, MA

Government through Republic Indonesia ministers of religion, organize Indonesia Smart Program (ISP) for Madrasah's Students. In the implementation of Indonesia Smart Program, government had issued some technical instructions about planning, implementation and money of Indonesia Smart Program (ISP) which the decision had assigned by the general director of Islamic education rules number 1022, 2016 about technical instructions of Indonesian Smart Program for the Madrasah's Students 2016 fiscal year. This research aims to evaluating the Indonesia Smart Program, which seen from the aspects of readiness, implementation and utilization of Indonesia Smart Program for the Dolok Masihul national Madrasah Ibtidaiyah Serdang Bedagai district. The research was performed by descriptive methods with the response drawn from the school element and Indonesia Smart Program beneficiaries students. The result of this study indicate that the evaluation benefit of Indonesia Smart Program at Dolok Masihul national Madrasah Ibtidaiyah Serdang Bedagai district on the aspect of readiness Indonesia Smart Program beneficiaries and overall was belong to well done categories, and also from the aspect of implementation and both of beneficial the supporting factor from this Indonesia Smart Program is the existing data account of the student's before the program implementation, while the resistor factor is the lack of socialization from school management to the students. To improving success of the Indonesia Smart Program required of some technical instruction and SOP in the Indonesia Smart Program implementation.

Keywords : policy evaluation, Indonesia Smart Program (ISP), Madrasah Ibtidaiyah

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **”Evaluasi Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Studi Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Padakeempataninipenulismengucapkanterimakasihkepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. A. Ya`kub Matondang MA selaku Rektor Universitas Medan Area,
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA selaku Ketua Program Studi MAP Program Pascasarjana Universitas Medan Area,
4. Komisi Pembimbing : Dr.Heri Kusmanto, MA, sebagai Pembimbing I dan Drs. Kariono, MA sebagai Pembimbing II
5. Ayah dan Ibunda, anak-anakku serta semua saudara/keluarga
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2015 .
7. Seluruh Dosen/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

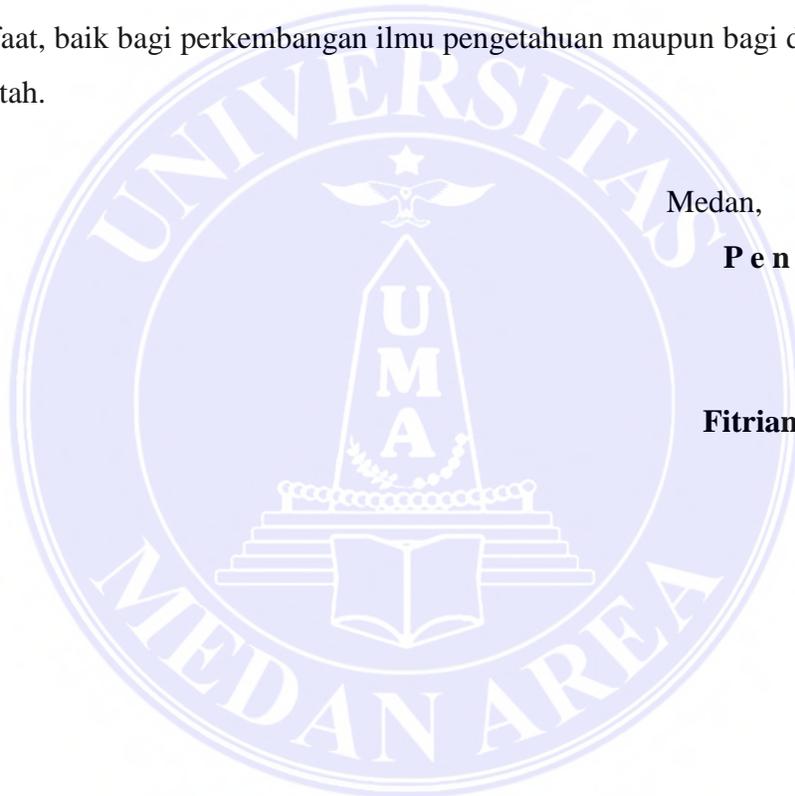
8. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang
Bedagaibeserta pegawai, gurudan siswa

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaan dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Juni 2017

P e n u l i s,

Fitriana Senja



DAFTAR ISI

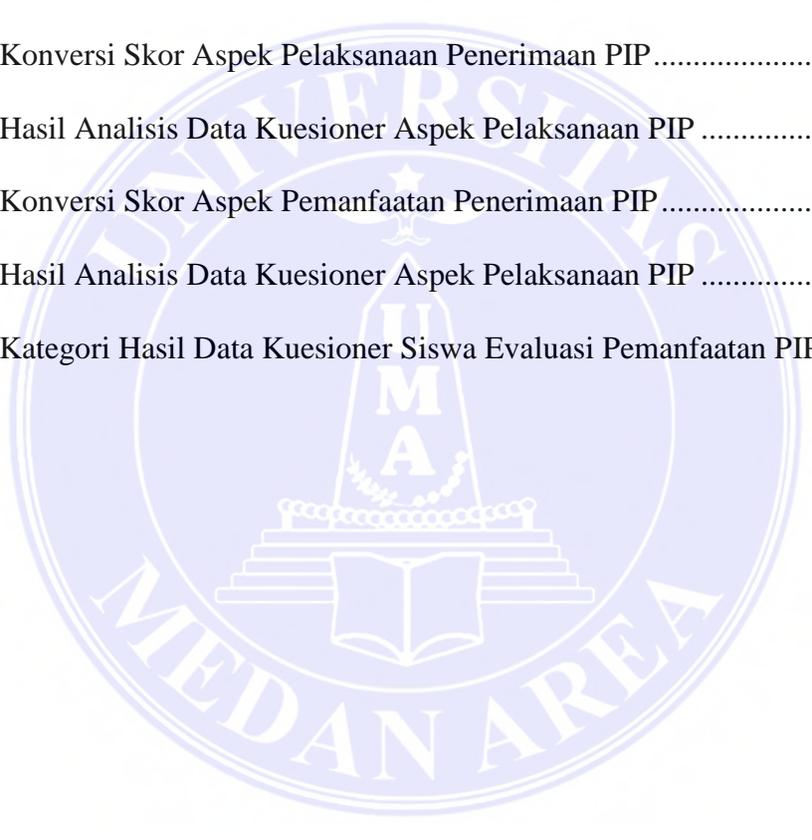
Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik.....	8
2.2. Evaluasi kebijakan Publik	10
2.3. Kajian Penelitian Yang Relevan	26
2.4. Program Indonesia Pintar (PIP)	30
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.2. Jenis Penelitian.....	44
3.3. Populasi dan Sampel	44
3.4. Teknik pengumpulan data.	45
3.5. Variabel Penelitian.	46

3.6. Teknik Analisis Data.	47
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.2. Hasil Penelitian	63
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	73
4.4. Faktor Pendukung Pemanfaatan Program Indonesia Pintar	79
4.5. Faktor Penghambat Pemanfaatan Program Indonesia Pintar	80
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kategori data kuesioner siswa.....	64
Tabel 2 Konversi SkorAspek Kesiapan Penerimaan PIP	65
Tabel 3 Hasil Analisis Data KuesionerAspek Kesiapan Penerimaan PIP.....	65
Tabel 4 Konversi Skor Aspek Pelaksanaan Penerimaan PIP	67
Tabel 5 Hasil Analisis Data Kuesioner Aspek Pelaksanaan PIP	68
Tabel 6 Konversi Skor Aspek Pemanfaatan Penerimaan PIP	71
Tabel 7 Hasil Analisis Data Kuesioner Aspek Pelaksanaan PIP	71
Tabel 8 Kategori Hasil Data Kuesioner Siswa Evaluasi Pemanfaatan PIP ...	78



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Sistem Kebijakan Publik.....	9
Gambar 2 Struktur organisasi MIN Dolok Masihul	61



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Instrumen Penelitian.....	90
2. Surat Permohonan Izin Penelitian	
3. Surat Keterangan Pelaksanaan/Selesai Penelitian	
4. SK Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar	
5.Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2016	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak untuk segera diselesaikan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Penanganannya memerlukan langkah dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban warga negara serta untuk memenuhi hak-hak dasarnya secara layak, hal ini dilakukan melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial agar warga masyarakat yang mengalami masalah sosial tetap terpenuhi hak – hak dasarnya sebagai warga negara dan mendapatkan layanan dan akses dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Salah satu hak dasar warga negara adalah mendapatkan layanan pendidikan dan hal ini menjadi kewajiban pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan akses dan mutu pendidikan kepada seluruh warga masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang kehidupan serta untuk memajukan bangsa dan negara agar tercapai masyarakat yang terdidik, cerdas dan berakhlak mulia.

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat khususnya padasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, pemerintah melaksanakan Program IndonesiaPintar (PIP) sebagai penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). ProgramIndonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah darikeluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau yang memenuhi kriteria sebagaimanaditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar ditandai dengan pemberian Kartu IndonesiaPintar (KIP) kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu pemilik Kartu KeluargaSejahtera(KKS). Kartu tersebut sebagai identitas/penanda untuk mendapatkan manfaat ProgramIndonesia Pintar dan hal ini hanya akan diperoleh apabila anak tersebut mendaftar disekolah/madrasah, pondok pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C), lembaga pelatihanatau kursus.

Penerima KIP adalah anak usia 6 - 21 tahun yang bersekolah maupun tidak bersekolah,yang berasal dari keluarga penerima KKS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.Selanjutnya anak-anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinanmelaporkan KIP tersebut ke sekolah/madrasah untuk diusulkan sebagai penerima manfaatprogram tersebut. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima program agar menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal darirumah tangga miskin dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia.

Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar dilaksanakan dua kali didalam satu tahun anggaran, yaitu periode Januari-Juni Tahun 2016 untuk semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 yang dapat dicairkan mulai bulan Januari, dan periode Juli-Desember Tahun 2016 untuk semester I Tahun Pelajaran 2016/2017 yang dapat dicairkan mulai bulan Juli. Dengan penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar dua kali dalam setahun diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (drop-out) karena ketidakterediaan biaya. Disamping itu juga untuk memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentan kemiskinan yang berada pada periode transisi (antar jenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari MI ke MTs atau dari MTs ke MA) dapat terus melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu dan dalam rangka pemerataan pendidikan dan menurunkan angka anak putus sekolah serta menarik anak untuk mau kembali bersekolah, Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menyelenggarakan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa madrasah. Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pemerintah telah mengeluarkan petunjuk teknis tentang perencanaan, pelaksanaan dan monev Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu dengan ditetapkannya

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2016.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu sekolah yang menjadi sasaran dari kebijakan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2016 dan merupakan penerima manfaat terbanyak untuk tingkat Madrasah se Kabupaten Serdang Bedagai, dalam pelaksanaan peraturan tersebut menemui berbagai masalah baik yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan, penyaluran dan pelaporan dari Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut. Dalam perencanaan dan penetapan, penentuan siswa yang berhak mendapatkan Program Indonesia Pintar sering tidak tepat sasaran dan kurangnya sosialisasi dari sekolah dan dinas terkait tentang Program Indonesia Pintar (PIP), pemberitahuan informasi yang selalu mundur dari pihak terkait. Dalam hal penyaluran dana sering terjadi waktu pencairan dana yang tidak sesuai dengan waktu kebutuhan siswa serta tidak adanya monitoring dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan monitoring pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar (PIP) juga sulit dipantau oleh Sekolah karena penerimaan dana langsung kepada siswa melalui rekening siswa sehingga tidak menutup kemungkinan untuk disalahgunakan.

Atas dasar uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tentang Evaluasi Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Studi Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kesiapan penerima Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?
- b. Bagaimana pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?
- c. Bagaimana pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?
- d. Apa faktor-faktor yang mendukung pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?
- e. Apa faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3. Tujuan Penelitian

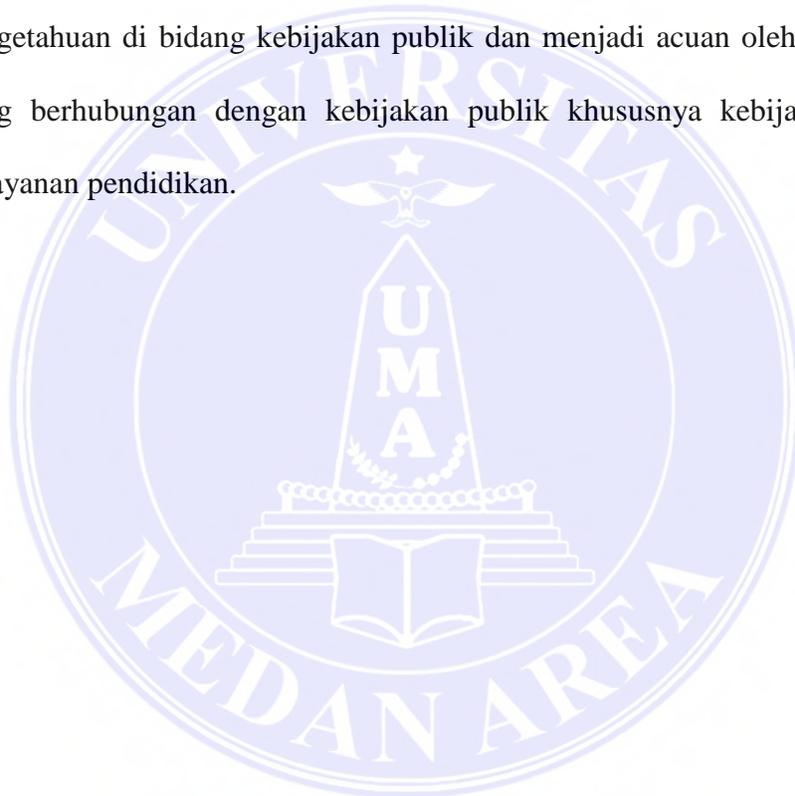
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

- a. Kesiapan penerima Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. Faktor-faktor yang mendukung pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. Faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- (a) Secara praktis sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan.
- (b) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan menambah khasanah pengetahuan di bidang kebijakan publik dan menjadi acuan oleh penelitian lain yang berhubungan dengan kebijakan publik khususnya kebijakan di bidang pelayanan pendidikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

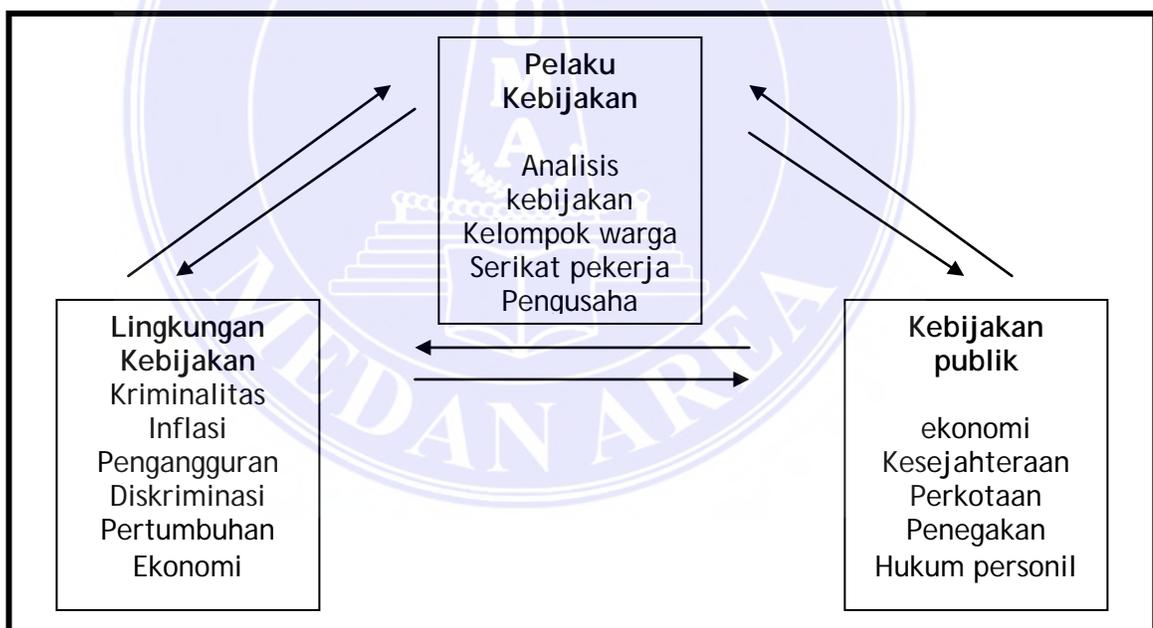
Kebijakan publik mempunyai definisi yang bermacam-macam. Thomas R. Dye (dalam Nugroho, 2004:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat suatu kehidupan bersama tampil beda. Sementara itu Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagaimana dikutip Anderson (1984:13-15) sebagai “the authoritative allocation of values for the whole society”. Berdasarkan definisi tersebut Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat membuat pilihan melakukan suatu tindakan atau tidak pada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah termasuk para penguasa dalam system politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari di masyarakat yang telah menjadi tanggungjawabnya. Dalam suatu glosari di bidang administrasi Negara, kebijakan publik diberikan arti sebagai berikut:

1. Susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
2. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
3. Masalah – masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dari berbagai pengertian tersebut maka kebijakan publik (publik policy) merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan publik pada hakekatnya berada dalam suatu system. Menurut Dunn (1994:70-71) system kebijakan adalah seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara ketiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Gambar 1: Sistem Kebijakan Publik



Sumber : Dunn (1994: 71)

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan diinformasikan ke dalam bidang-bidang isu

(masalah). Sementara pelaku kebijakan (policy stakeholders) adalah para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.

Lingkungan kebijakan (policy environment) adalah konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling masalah kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Oleh karena itu system kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, artinya bahwa di dalam praktek pembuatan kebijakan dimensi obyektif dan subyektif tidak dapat dipisahkan. System kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan secara sadar oleh para pelaku kebijakan melalui pilihan-pilihan. System kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya. Pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan, demikian pula analisis kebijakan merupakan pencipta sekaligus hasil ciptaan system kebijakan.

2.2. Evaluasi Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian; hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Sedangkan Stufflebeam dalam Arikunto (2006 : 1) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan

lebih berkenan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan

tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);

4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang

diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Menurut Abidin (2006:211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (ex-ante evaluation);
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring;
3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (ex-post evaluation).

Abidin (2006:213) lebih lanjut mengemukakan bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (values) yang antara lain berkenaan dengan :

1. Efisiensi (Efficiency), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya);
2. Keuntungan (profitability), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil/biaya);
3. Efektif (effectiveness), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya;
4. Keadilan (equity), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan);
5. Detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal;
6. Manfaat tambahan (marginal rate of return), yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan (change-in benefits/change –in-cost).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu upaya untuk mengukur, menilai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam lingkup yang lebih umum atau keseluruhan dari tahapan kebijakan publik.

2.2.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Wibawa dkk (1994:9-10) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui 4 aspek yaitu :

1. Proses pembuatan kebijakan;
2. Proses implementasi;
3. Konsekuensi kebijakan;
4. Efektivitas dampak kebijakan.

Evaluasi terhadap aspek kedua disebut evaluasi implementasi sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Riant Nugroho, dalam premisnya mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti sehingga ada klausula “ dapat diganti setelah dilakukan evaluasi “ dalam setiap kebijakan publik. Hal ini perlu dijadikan acuan karena, pertama, untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik di Indonesia yang sering menerapkan prinsip ganti pejabat, harus ganti peraturan. Kedua, supaya setiap kebijakan tidak diganti hanya karena keinginan atau selera pejabat yang saat itu berwenang (Nugroho, 2008:471).Terkait dengan hal tersebut tujuan evaluasi menurut

Nugroho (2008:472) adalah bukan untuk menyalahkan pihak yang mengeluarkan kebijakan, namun untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan pencapaian suatu kebijakan serta bagaimana menutup kesenjangan tersebut.

Menurut pendapat Marielle Berriet-Sollic, Pierre Labarthe, Catherine Laurent and Jacques Baudry dalam Makalah yang dipersiapkan untuk “Seminar 122 European Association of Agricultural Economist (EAAE) “ di Ancona, 17-18 Februari 2011 yang berjudul *Empirical validity of the evaluation of public policies: models of evaluation and quality of evidence*, mengatakan bahwa :

When an evaluation procedure is used to assess a public action programme, generally the goal is to produce the best knowledge possible on the actual impact of the programme. The best knowledge should be a) based on relevant empirical evidence (which addresses the question at hand); b) corroborated by facts (facts which reflect real world observation and are empirical in nature) and c) reliable (knowledge produced using rigorous methods).

Pernyataan di atas memberikan pengertian bahwa ketika prosedur evaluasi digunakan untuk menilai pelaksanaan program kebijakan publik, umumnya tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan terbaik tentang dampak program yang sebenarnya. Pengetahuan "terbaik" seperti dimaksud di atas harus didasarkan pada bukti empiris yang relevan, diperkuat oleh fakta (fakta yang mencerminkan observasi dunia nyata dan empiris di alam) dan terpercaya dalam artian pengetahuan yang dihasilkan menggunakan metode yang ketat.

2.2.3. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Fungsi Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2011:463) memiliki empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. (1) Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan; (4) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Selain hal tersebut diatas, fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Putra (2003:93) ada tiga hal pokok, yaitu : (1) memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan; (2) untuk menilai kepasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi; dan (3) untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segi metodologinya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan secara keseluruhan dapat berlangsung secara baik.

Fungsi evaluasi menurut Agustino (2006:188-189) ada tiga macam yaitu :

1. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan;

2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn (2003:609-611) evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik;
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepatutan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepatutan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif);
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis

kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada defenisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Menurut Samodra Wibawa (1994), evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi yaitu :

1. **Ekplanasi.** Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan;
2. **Kepatuhan.** Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;
3. **Audit.** Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;
4. **Akunting.** Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

2.2.4. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Kriteria-kriteria yang dirumuskan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan padakuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;

4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Chris. I. Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Department of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State – Nigeria dalam “British Journal of Humaniora dan Social Science”(April 2012, Vol. 5 (1) dengan judul *Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in Third World*, yang mengatakan bahwa :

Evaluation of public programmes leads to questions by the policy makers not only on whether the policy has succeeded in achieving the goal for which it was initiated and formulated or designed, but also assist in finding out from the target group how they perceive the programme or policy as well as various prognosis/strategies necessary to make the programme move viable.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa evaluasi program publik mengarah pada pertanyaan kepada para pembuat kebijakan yang tidak hanya pada keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang dirumuskan atau dirancang, tetapi juga membantu dalam mencari informasi dari kelompok sasaran bagaimana mereka memandang program atau kebijakan serta berbagai strategi yang diperlukan untuk membuat program yang lebih layak.

Seanjutnya masih dalam Chris. I. Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Department of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State – Nigeria dalam “British Journal of Humaniora dan Social Science”(April 2012, Vol. 5 (1) dengan judul Public *Policy and the Challenges of Policy Evaluation in Third World*, menyatakan bahwa :

In evaluating public programmes and policies, it is therefore, advisable that evaluators must adopt or use certain relevant indicators in such exercise. Thus, indicators are indication of a given situation (WHO, 1981:8). Therefore, the use of indicators will guide the investigator or policy maker to ascertain what should be measured, the criteria for such measurement and comparison of the phenomenon with other existing public programmes already implemented.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa dalam mengevaluasi program dan kebijakan publik, disarankan agar "evaluator" diharuskan mengadopsi atau menggunakan indikator tertentu yang relevan dalam pelaksanaannya. Indikator harus dapat memberikan indikasi dan refleksi dari situasi program yang dievaluasi (WHO,

1981: 8). Oleh karena itu, penggunaan indikator akan memandu peneliti atau pembuat kebijakan untuk memastikan apa yang harus diukur, kriteria untuk pengukuran tersebut dan perbandingan fenomena dengan program publik lainnya yang ada dan sudah dilaksanakan.

2.2.5. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik memiliki pendekatan yang beragam tergantung tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan melakukan evaluasi. Menurut Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yaitu :

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan berakhir, yang diarahkan untuk melihat pencapaian program dalam mengatasi masalah pembangunan yang ingin

dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) atau manfaat (dampak terhadapkebutuhan) program.

Dunn (2003:613-620) membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga, yaitu :

1. Evaluasi Semu. Evaluasi semu (pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial;
2. Evaluasi Formal. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal dan merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program;
3. Evaluasi Keputusan Teoritis. Evaluasi ini merupakan pendekatan yang menggunakan metodedeskriptif unuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasilkebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Asumsi evaluasi teoritis keputusan adalah

tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*) dengan pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi yang bertujuan untuk menilai keberhasilan program dengan indikator sesuai kriteria-kriteria kebijakan publik yang dipaparkan oleh Dunn dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak ada pilihan model yang terbaik, yang ada adalah pilihan yang harus kita pilih secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan kebijakannya sendiri (Riant Nugroho, 2008:454);
2. Dalam penelitian ini fokus penelitian lebih tertuju pada kriteria-kriteria kebijakan publik yang dipergunakan sebagai indikator keberhasilan kebijakan yang lebih menekankan pada unsur-unsur pokok dalam sebuah evaluasi yakni efektivitas, Efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Sementara model yang paling detail membahas permasalahan ini adalah model William N Dunn.

2.2.6. Kajian Model Evaluasi Countenance Stake

Suharsimi Arikunto & Cepi SAJ (2007:27), menjelaskan model stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu: (1) deskripsi (*description*) dan (2) pertimbangan (*judgement*); serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) antecedes (*antecedents/context*), (2) transaksi (*transactions/process*), dan (3) keluaran (*output-outcomes*). Terdapat tiga

hal yang dituliskan di antaradua diagram menunjukkan sasaran evaluasi. Dalam tiap program yang dievaluasi,evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu (a) antecedents sebagaikonteks, (b) transactions sebagai proses, dan (c) outputs-outcomes sebagai keluaran atau hasil. Kedua matriks tersebut digambarkan sebagai description dan judgement, menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi. Matrik description menyangkut dua hal yang menunjukkan posisi sesuatu (sasaran evaluasi), yakni berkaitan maksud dan tujuan yang diharapkan oleh program, dan pengamatan atau akibat yang terjadi. Matrik kedua adalah judgements, yang dalam langkah tersebut mengacu pada standar.

Hamid Hasan (2008:212), menjelaskan proses pelaksanaan model evaluasi stake adalah sebagai berikut: a. Mengumpulkan data dan informasi yang digunakan untuk pengembangan program baik yang berhubungan dengan kondisi awal atau antecedents (masukan), transactions (proses), dan juga outcomes (hasil). b. Menganalisis data deskriptif mengenai kesesuaian tujuan program dengan apa yang terjadi dalam kegiatan. c. Melakukan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji dengan menggunakan standar mutlak dan standar relatif untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan sebenarnya dan juga untuk menilai sejauh mana kebermanfaatan program tersebut.

2.3. Kajian Penelitian yang Relevan

Acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan dari berbagai hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung penelitian yang relevan. Penelitian ini didukung oleh penelitian

yang sudah dilakukan dan digunakan sebagai bahan referensi yaitu sebagai berikut: Penelitian yang dilakukan Philip Suprastowo (2014) dengan judul “Kontribusi Bantuan Siswa Miskin terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pendidikan siswa” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Bantuan Siswa Miskin terhadap keberlangsungan sekolah yang terkait dengan Angka Putus Sekolah (APS), Angka Mengulang Kelas (AMK), disiplin dan prestasi belajar serta keberlanjutan pendidikan. Hasil Penelitian menemukan bahwa BSM : 1) Berkontribusi positif terhadap rendahnya APS, bahkan menurunkan dari rata-rata 1,11% pada tahun 2010 menjadi 0,66% ditahun 2011 dan pada tahun 2012 turun lebih rendah menjadi 0,46%; 2) Menekan rendahnya AMK, dari 0,78% menjadi 0,65% dan 0,64%; 3) Meningkatkan disiplin dan motivasi belajar, baik di sekolah maupun di rumah; 4) Berkontribusi meningkatkan nilai hasil belajar sampai 0,39 poin pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris (diujikan secara nasional-UN/USBN); namun, diketahui bahwa BSM belum diorientasikan secara sistematis untuk keberlanjutan pendidikan. Penelitian yang dilakukan Sri Esnawati (2014) dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran 2012/2013 di SMP Negeri 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dilihat dari sasaran, mekanisme pengusulan, pengambilan dana, pemanfaatan dana, dan tugas dan tanggung jawab, serta faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran BSM di SMP N 15 Yogyakarta adalah siswa

yang memiliki Kartu BSM sebanyak 15 siswa. Mekanisme pengusulan dimulai dari siswa menyerahkan Kartu BSM ke Guru BK. Guru BK merekapitulasi dan memverifikasi data siswa pemilik Kartu BSM untuk dikirim ke Kemdikbud melalui Disdik Kota Yogyakarta. SK penerima BSM dikeluarkan oleh Kemdikbud kemudian ditindaklanjuti oleh sekolah untuk mengambil dana BSM di kantor pos. Dana BSM diambil secara kolektif oleh Guru BK dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh siswa. Dana BSM diserahkan oleh Guru BK kepada siswa dan disaksikan oleh orang tua siswa. Dana BSM dimanfaatkan oleh siswa untuk membeli sepatu, seragam, alat tulis, tas, dan pianika. Tugas yang dilaksanakan oleh sekolah yaitu mendata siswa penerima Kartu BSM, mengirim laporan realisasi dana ke kantor pos dan Disdik Kota Yogyakarta, menerima pengaduan, dan memantau presensi siswa di sekolah. Tugas yang tidak dilaksanakan oleh sekolah yaitu menyusun skala prioritas siswa calon penerima BSM, membuat SK Kepala Sekolah, dan melakukan pembinaan dan evaluasi. Faktor pendukung implementasi: informasi yang diberikan secara rutin dari dinas ke sekolah, adanya rasa saling percaya terkait pemanfaatan dana, penggunaan Data Pokok Pendidikan dan Basis Data Terpadu mampu meningkatkan keakuratan sasaran. Faktor penghambat: pelaksana kebijakan di sekolah kurang beradaptasi dengan mekanisme baru, kurangnya pembinaan bagi siswa penerima bantuan, sulitnya mengumpulkan kuitansi pemanfaatan dana BSM dari siswa, terbatasnya dokumen atau arsip sekolah terkait BSM.

Penelitian yang dilakukan Wira Saputra (2014) dengan Judul “Evaluasi Realisasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2012 Di Smk N 1 Sukasada”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang kualitas realisasi program bantuan siswa miskin (BSM-SMA/SMK) di SMK N 1 Sukasada, ditinjau dari: (1) konteks, (2) input, (3) proses, dan (4) produk serta menemukan kendala atas penyelenggaraannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kriteria ideal teoretik, realisasi program bantuan siswa miskin (BSMSMA/SMK) di SMK N 1 Sukasada adalah sebagai berikut. (1) Ditinjau dari segi konteks, pelaksanaannya tergolong tidak baik dengan rerata skor siswa 56,41, rerata skor warga sekolah 50,74, rerata skor masyarakat 55,60, dan rerata skor pimpinan lembaga 51,67. (2) Ditinjau dari segi input, pelaksanaannya tergolong tidak baik dengan rerata skor siswa 60,13, rerata skor warga sekolah 57,05, rerata skor masyarakat 58,15, dan rerata skor pimpinan lembaga 57,33. (3) Ditinjau dari segi proses, pelaksanaannya tergolong sangat tidak baik, dengan rerata skor siswa 31,23, rerata skor warga sekolah 28,11 rerata skor masyarakat 31,15, dan rerata skor pimpinan lembaga 28,50. (4) Ditinjau dari segi produk, pelaksanaannya tergolong sangat tidak baik, dengan rerata skor siswa 58,55, rerata skor warga sekolah 54,21, rerata skor masyarakat 61,50, dan rerata skor pimpinan lembaga 51,17. (5) Kendala utama yang dihadapi dalam realisasi program bantuan siswa miskin (BSM-SMA/SMK) di SMK N 1 Sukasada adalah 1) kurangnya sosialisasi pelaksanaan program baik kepada masyarakat maupun warga sekolah, 2) rendahnya sikap dan kesadaran siswa, dan 3) terbatasnya sumber daya pelaksana

program. Dari hasil analisis menggunakan T-Skor yang dikonfirmasi ke dalam kuadran Glickman menunjukkan bahwa, realisasi program bantuan siswa miskin (BSM-SMA/SMK) di SMK N 1 Sukasada berada pada kuadran III, yang mana tergolong kurang efektif.

Persamaan penelitian dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah mengevaluasi Program Bantuan Siswa Miskin. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada kajiannya yang lebih difokuskan untuk mengevaluasi pemanfaatan Bantuan Siswa Miskin di Madrasah yang telah berubah namanya menjadi Program Indonesia Pintar. Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya akan mempengaruhi pada hasil penelitian yang diperolehnya.

2.4. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.

4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.

KIP diberikan sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri (jika belum) ke lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus dan Lembaga Pendidikan Non Formal lainnya dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud dan Kementerian Agama/Kemenag).

Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar mempunyai persamaan dan perbedaan dengan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya. Persamaannya adalah Program BSM (2008 – 2014) disempurnakan melalui dan menjadi bagian dari Program Indonesia Pintar dan salah

satunya merupakan program pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak yang berhak terutama dari keluarga pemilik Kartu Keluarga Sejahtera/KKS dan kriteria lain yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui penerbitan KIP sebagai penanda/identitas bagi anak. Sedangkan Perbedaannya adalah

Program	Pagu Siswa Anak Penerima Manfaat	Cakupan	Penanda
Program BSM	11, 2 juta anak (Tahun 2014)	Siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan formal	KPS yang dimiliki rumah tangga
Program PIP (melalui KIP)	<ul style="list-style-type: none"> • 20, 3 juta anak (Tahun 2015) • 19,5 juta anak (Tahun 2016) 	Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang bersekolah di lembaga pendidikan formal dan non formal	KIP dan KKS (KIP diberikan kepada setiap anak usia sekolah usia 6 – 21 tahun)

Sumber : Kementerian Agama, 2016.

Adapun tujuan dari Program Indonesia Pintar Melalui KIP adalah

1. Menghilangkan hambatan anak (usia sekolah) secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah.
2. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
3. Menarik anak/siswa yang putus/tidak sekolah agar kembali bersekolah.
4. Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.
5. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).

Sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar/KIP adalah untuk tahun 2016, KIP direncanakan diberikan kepada 19.5 juta anak usia sekolah (6-21 tahun) baik dari keluarga/rumah tangga pemegang KKS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria siswa penerima KIP adalah :

1. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS yang telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar pada 2015 dari Kemendikbud dan Kemenag.
2. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial.
4. Anak/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang keluarga/rumah tangganya memiliki KKS (khusus untuk PIP Kementerian Agama) maupun melalui jalur usulan Pondok Pesantren (sejenis FUM/Formulir Usulan Madrasah).
5. Siswa usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/ bencana alam.
6. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang belum atau tidak lagi bersekolah yang datanya telah direkapitulasi pada Semester 2 (Tahun Pelajaran/TA) 2015/2016. Besarnya jumlah bantuan Program Indonesia Pintar adalah :

Jenjang Pendidikan	Jumlah Bantuan per semester/6 bulan
SD/MI/Diniyah Formal Ula/SDTK Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 7-12 thn) Kejar Paket A/PPS Wajar Dikdas Ula	Rp. 225.000,-
SMP/MTS/Diniyah Formal Wustha/SMPTK Pondok Pesantren (Santri hanya mengaji usia 13-15 thn) Kejar Paket B/PPS Wajar Dikdas Wustha	Rp.375.000,-

SMA/SMK/MA/Diniyah Formal Ulya/Muadalah/SMTK/SMAK Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 16-18 thn) Kejar Paket C/PMU Ulya/Lembaga pelatihan/kursus	Rp. 500.000,-
---	---------------

Mekanisme penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendapatkan bantuan pendidikan di Tahun 2016 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud):

Proses Pelaporan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada Sekolah/Lembaga Pendidikan lainnya:

A. Bagi Anak Penerima KIP maupun Anak dari keluarga Penerima KKS (tetapi belum menerima KIP) yang bersekolah di Lembaga Pendidikan Formal:

1. Anak penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bersekolah di sekolah formal membawa kartu yang dimiliki ke sekolah untuk didaftarkan sebagai calon penerima PIP dalam aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang dikelola oleh Kemendikbud.
2. Anak dari keluarga/rumah tanggapemegang KKS tetapi belum menerima KIP, yang bersekolah di sekolah formal juga dapat membawa kartu yang dimiliki ke sekolah dengan disertai dokumen pendukung (Kartu Keluarga/KK/surat keterangan yang menyatakan anak sebagai anggota keluarga/rumah tangga pemegang KKS jika keluarga tidak memiliki KK).
3. Sekolah kemudian memasukkan data anak (nomor KIP atau KKS) calon penerima PIP ke dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara

benar dan lengkap. Data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima PIP dari tingkat sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan direktorat teknis pelaksana PIP di tingkat Pusat.

B. Bagi Anak Penerima KIP maupun Anak dari keluarga Penerima KKS (tetapi belum menerima KIP) yang bersekolah di Lembaga Pendidikan Non Formal (Paket/Kursus/Pelatihan dll):

1. Anak pemegang KIP maupun anak tanpa KIP (tetapi dari keluarga pemegang KKS) yang belajar di lembaga pendidikan non-formal (seperti SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan) melaporkan kartu ke SKB/PKBM/Lembaga Kursus dan Pelatihan tempat mereka terdaftar.
2. SKB/PKBM/Lembaga Kursus dan Pelatihan mendaftarkan anak pemegang KIP maupun anak tanpa KIP (yang keluarganya menerima KKS) untuk kemudian menyampaikan data usulan calon penerima manfaat PIP sesuai dengan Format Usulan Lembaga ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (seperti terlampir dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIP di Kemendikbud) atau melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar dalam Dapodik (sesuai dengan kesiapan dari Kementerian pelaksana program).

C. Bagi Anak Penerima KIP maupun anak dari keluarga Penerima KKS (tetapi belum menerima KIP) yang putus/tidak lagi bersekolah baik di sekolah formal maupun non-formal:

1. Anak usia sekolah penerima KIP maupun yang tidak menerima KIP (tetapi keluarganya menerima KKS) tetapi putus/tidak lagi sekolah, harus mendaftarkan diri ke sekolah maupun ke lembaga pendidikan non-formal (seperti SKB/PKBM/Paket/Kursus dan Pelatihan, jika tidak dapat masuk ke sekolah) sebelum melaporkan kartu yang mereka terima ke lembaga pendidikan dan mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar.
2. Setelah terdaftar, sekolah/lembaga pendidikan tempat anak terdaftar, mengusulkan anak penerima kartu tersebut untuk didaftarkan sebagai calon penerima manfaat PIP baik melalui usulan calon penerima manfaat PIP 2016 sesuai dengan Format Usulan Lembaga ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (seperti terlampir dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIP di Kemendikbud) atau melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar dalam Dapodik (sesuai dengan kesiapan dari Kementerian pelaksana program).
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan/meneruskan usulan anak calon penerima PIP dari sekolah/SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan sebagai usulan kedirektorat teknis pelaksana PIP di tingkat pusat.

Proses Penyaluran Manfaat Program Indonesia Pintar/PIP:

1. Kemendikbud akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Siswa Penerima Bantuan PIP dan mengirimkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan, daftar penerima manfaat PIP ke lembaga penyalur yang telah ditunjuk.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP ke sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya beserta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan.
3. Sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya memberitahukan ke siswa/orangtua waktu pengambilan dana bantuan.
4. Siswa/orangtua mengambil dana bantuan ke lembaga penyalur yang ditunjuk

Kementerian Agama (Kemenag):

Proses Pelaporan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada Sekolah/Lembaga Pendidikan lainnya:

- A. Anak Penerima KIP maupun Anak dari keluarga Penerima KKS (tetapi belum menerima KIP) yang bersekolah di Lembaga Pendidikan Formal (Madrasah):
 1. Anak penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bersekolah di madrasah membawa kartu yang dimiliki ke madrasah untuk didaftarkan sebagai calon penerima PIP Madrasah.
 2. Anak dari keluarga/rumah tanggapemegang KKS tetapi belum menerima KIP, yang bersekolah di madrasah juga dapat membawa kartu yang dimiliki ke madrasah dengan disertai dokumen pendukung (Kartu Keluarga/KK/surat keterangan yang menyatakan anak sebagai anggota keluarga/rumah tangga pemegang KKS jika keluarga tidak memiliki KK).
 3. Madrasah kemudian memasukkan data anak (nomor KIP atau KKS) calon penerima PIP ke dalam dalam aplikasi Education-MIS (E-MIS) yang dikelola

oleh Kemenag; atau mengirimkan rekapitulasi data anak penerima kartu ke Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten/Kota (tergantung dari kesiapan kementerian pelaksana program) secara benar lengkap. Data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima PIP dari tingkat madrasah ke Kantor Kementerian Agama/Kankemenag Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi dan direktorat teknis pelaksana PIP di tingkat Pusat.

- B. Anak Penerima KIP maupun Anak dari keluarga Penerima KKS (tetapi belum menerima KIP) yang bersekolah di Lembaga Pendidikan Non Formal dibawah Kemenag (Pondok Pesantren):
1. Anak pemegang KIP maupun anak tanpa KIP (tetapi dari keluarga pemegang KKS) yang belajar di Pondok Pesantren melaporkan kartu yang diterima kepada Pondok Pesantren tempat santri belajar.
 2. Pondok Pesantren mendaftarkan anak pemegang KIP maupun anak tanpa KIP (yang keluarganya menerima KKS) untuk kemudian menyampaikan data usulan calon penerima manfaat PIP sesuai dengan Format Usulan Lembaga ke KanKemenag Kabupaten/Kota (seperti terlampir dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIP di Kemenag) atau melalui aplikasi E-MIS Kemenag (sesuai dengan kesiapan dari Kementerian pelaksana program).

Proses Rekapitulasi KIP dan/atau KKS serta Penyaluran Manfaat Program Indonesia Pintar/PIP di Kementerian Agama:

1. Untuk Madrasah Swasta, Kepala Madrasah mencatat dan merekapitulasi siswa yang memiliki KIP dan/atau KKS berdasarkan format sesuai pedoman pelaksanaan program, untuk kemudian merekapitulasi nama siswa tersebut sebagai penerima manfaat KIP dan mengajukannya sesuai kuota yang diberikan oleh Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Kepala Madrasah Negeri membuat Surat Keputusan (SK) Penetapan Siswa Penerima Manfaat PIP, berita acara SK serta Rekapitulasi Siswa Calon Penerima Manfaat PIP dan mengirim seluruh salinan format ke Kantor Kementerian Agama/Kankemenag Kabupaten/Kota
3. Kankemenag Kabupaten/Kota merekapitulasi usulan siswa calon penerima bantuan program dan menetapkan seluruh penerima bantuan yang memiliki KIP dan atau KKS serta anak dari keluarga KKS yang belum menerima KIP.
4. Apabila kuota kabupaten/kota masih tersedia, Kankemenag Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penerima manfaat program dari usulan madrasah-non kartu melalui Format Usulan Madrasah/FUM.
5. Kankemenag Kabupaten/Kota menerbitkan SK Daftar Siswa Calon Penerima Manfaat PIP untuk madrasah swasta serta Rekapitulasi Siswa dan kemudian mengirimkan seluruh salinan format ke Kantor Wilayah/Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

6. Kanwil Kementerian Agama Provinsi merkapitulasi siswa penerima manfaat program dari Kankemenag Kabupaten/Kota dan menetapkan seluruh penerima manfaat PIP yang memiliki KIP serta anak/siswa dari keluarga KKS sebagai penerima manfaat PIP.
7. Apabila kuota masih tersedia, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dapat menetapkan calon penerima program dari usulan madrasah/non kartu.
8. Kanwil Kementerian Agama Provinsi menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan rekapitulasi siswa penerima manfaat program dan kemudian mengirimkan salinan surat keputusan tersebut ke Kankemenag Kabupaten/Kota untuk kemudian diteruskan ke madrasah swasta diinformasikan kepada siswa penerima manfaat program melalui KIP.
9. Madrasah memberitahukan ke siswa/orangtua waktu pengambilan dana bantuan.
10. Siswa/orangtua mengambil dana bantuan ke lembaga penyalur yang ditunjuk.

Untuk anak usia sekolah yang tidak lagi bersekolah tetapi mempunyai KIP, maka anak berhak untuk mendapatkan bantuan pendidikan tunai tersebut apabila anak mendaftarkan dirinya ke lembaga pendidikan formal atau nonformal seperti telah disebutkan di atas. Pemegang KIP berhak menerima manfaat selama aktif belajar di satuan program/pendidikan formal atau non formal di bawah Kemendikbud/Kemenag.

Anak dapat menggunakan KKS yang dimiliki oleh orang-tuanya untuk mendapatkan bantuan tunai tersebut. Anak/ dapat membawa KKS yang dimiliki

(beserta dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga/KK atau Surat Keterangan yang menyatakan anak sebagai anggota keluarga KPS/KKS jika anak/keluarga tidak memiliki KK) ke lembaga pendidikan formal atau non formal tempat anak terdaftar, untuk kemudian didata oleh lembaga pendidikan tersebut dan direkapitulasi sebagai calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar.

Keluarga miskin yang tidak menerima KKS dan memerlukan KIP buat pendidikan anak-anak mereka, dapat mengajukan usulan untuk menjadi calon penerima KIP/PIP ke sekolah/lembaga pendidikan tempat anak terdaftar, selama anak/keluarga memenuhi kriteria anak penerima PIP seperti yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya dari keluarga PKH, korban bencana alam, tinggal di Panti Asuhan/Sosial dll) melalui jalur usulan sekolah/madrasah/pondok pesantren.

Usulan untuk dapat memperoleh manfaat PIP di 2016 melalui mekanisme/jalur usulan sekolah/madrasah/pondok pesantren dapat diakomodasi setelah semua anak penerima KIP melaporkan kartu yang mereka terima kepada sekolah/lembaga pendidikan tempat anak terdaftar. Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak tersebut diatas, diberikan ditahun anggaran berikutnya. Jika anak memiliki KIP tetapi orang tuanya tidak memiliki KKS, maka anak tetap dapat menerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) 2016 selama anak terdaftar atau mendaftarkan diri ke sekolah/lembaga pendidikan lainnya.

Bagi orang tua yang tidak/memiliki KKS, tetapi anaknya menerima KIP, maka jika ingin mengajukan permohonan penerimaan KKS, dapat melaporkan diri

kepada Dinas Sosial setempat. (masih perlu dikonfirmasi kepada Kementerian Sosial/Kemensos terkait mekanisme tersebut). KIP diberikan kepada anak usia 6 – 21 tahun sebagai identitas/penanda bahwa anak berhak untuk mendapatkan bantuan PIP sampai anak lulus jenjang pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat. Anak bisa mendapatkan bantuan/dana KIP jika anak terdaftar di lembaga pendidikan formal ataupun non formal dan kemudian ditetapkan sebagai penerima manfaat PIP oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud atau Kementerian Agama/Kemenag.

Setelah menerima pemberitahuan dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal tempat anak terdaftar, siswa/orang tua dapat mengambil secara langsung manfaat/bantuan/dana program PIP ke lembaga/penyalur yang ditunjuk dengan membawa dan menunjukkan beberapa dokumen pendukung berupa: 1. Surat Pemberitahuan sebagai Penerima bantuan PIP dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal, dan 2. KIP atau KKS; 3. Salah satu bukti identitas lainnya (misalnya Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Rapor, Ijazah, dll) - ke lembaga penyalur yang ditunjuk. Lembaga penyalur yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud atau Kementerian Agama/Kemenag berbeda-beda tergantung lembaga penyalur yang terpilih dalam proses seleksi lembaga penyalur yang dilakukan oleh kementerian pelaksana program.

Bantuan/dana tunai pendidikan dalam kerangka PIP/KIP dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan anak/siswa seperti:

- a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
 - b. Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll)
 - c. Biaya transportasi ke sekolah
 - d. Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah
- Pihak Madrasah ikut mengawasi penggunaan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai peruntukannya.

Pemberian manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dibatalkan jika siswa :

- a. Meninggal dunia
- b. Berhenti sekolah
- c. Mengundurkan diri sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP)
- d. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal dan atau perbuatan asusila
- e. Mengonsumsi minuman keras/narkoba atau sejenisnya
- f. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian lapangan dilaksanakan selama dua bulan (Februari-Maret 2017) dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder sekaligus mengadakan pengamatan tentang Evaluasi Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

3.3. Populasi dan Sampel

Sebagai populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa/siswi yang mendapatkan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2016 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai yang berjumlah 150 orang siswa/siswi. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil sebesar 10% dari total populasi yaitu : $10\% \times 150 \text{ orang} = 15 \text{ orang}$ siswa/siswi. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional random sampling.

Di samping itu juga dilakukan wawancara dengan kepala sekolah dan pengelola dana Program Indonesia Pintar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

- Kuesioner, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dari responden melalui daftar pertanyaan tertutup dan terbuka yang diajukan. Dengan menyajikan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan.
- Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan key informan (informan kunci) secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti, yaitu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan staf.
- Observasi, dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi atau pengamatan langsung terhadap kegiatan Program Indonesia Pintar, observasi juga dimaksudkan untuk lebih mengetahui kondisi dilapangan secara mendalam mengenai Program Indonesia Pintar secara langsung dan nyata.

Sedangkan data sekunder, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu

hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam Evaluasi Program Indonesia Pintar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

3.5. Variabel Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2016 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

- a. *Antecedent* : yaitu kesiapan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan petunjuk teknis, yaitu Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2016.
- b. *Transaction*: yaitu pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan petunjuk teknis, yaitu Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2016.

- c. *Outcomes*: yaitu pemanfaatan Program Indonesia Pintar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan petunjuk teknis, yaitu Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2016.

3.6. Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan khususnya dari penyebaran angket akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut analisa tabel frekwensi. Analisa tabel tunggal (frekwensi) ini dimaksudkan untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan presentase dari masing-masing jawaban responden, sehingga akan dapat diketahui data yang paling dominan, atau yang paling besar persentasenya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan menjadi tiga aspek *Countenance Stake*, yaitu aspek kesiapan penerima PIP (*antecedents*), Pelaksanaan PIP (*Transaction*), dan pemanfaatan PIP (*outcomes*) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

1. Evaluasi Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai pada aspek kesiapan penerima Program Indonesia Pintar secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dengan persentase 78,75%. Aspek kesiapan penerima PIP terdiri dari 3 dimensi yaitu (a) dimensi administrasi sekolah sesuai dengan petunjuk teknis PIP dengan mendata awal siswa dari keluarga tidak mampu di awal siswa masuk untuk pemenuhan persyaratan pengajuan PIP, (b) Dimensi kesiapan penerima Program Indonesia Pintar pada siswa, sudah memahami tentang Program Indonesia Pintar (c) Dimensi Kesiapan staff sekolah secara keseluruhan sudah memahami tentang Program Indonesia Pintar dalam proses pengajuan, pelaksanaan dan pemanfaatan PIP.
2. Evaluasi Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai pada aspek pelaksanaan Program Indonesia Pintar secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dengan persentase

74,61% dan sesuai dengan petunjuk teknis PIP. Aspek pelaksanaan PIP terdiri dari 6 indikator. (a) Indikator sosialisasi PIP pada siswa sebesar 72,78% sedangkan pada orang tua sosialisasi PIP hanya disisipkan saat rapat dan terima rapor oleh sekolah. (b) Indikator Prosedur pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis PIP yaitu guru serta staf TU melakukan pendataan kepemilikan KPS pada siswa serta siswa dari keluarga tidak mampu. (c) Indikator tahap pengajuan PIP sebesar 72,5%. Sekolah mengajukan seluruh siswa yang berhak memperoleh PIP dengan data saat awal masuk sekolah bagi siswa yang memiliki KPS dan tidak mampu. (d) Indikator Penetapan Penerima PIP sebesar 70%. Sekolah menginformasikan Surat Keputusan Penerima PIP langsung kepada siswa. (e) Indikator tahap pencairan sebesar 72,78%. Waktu pencairan dana PIP dianggap kurang tepat karena dicairkan 2 tahap yaitu di akhir semester sehingga dari sisi pemanfaatan menjadi tidak maksimal untuk pendidikan. (f) Indikator Monitoring dan evaluasi sebesar 85%. Sekolah melakukan kebijakan mengelola dana PIP oleh siswa dengan memonitoring penggunaan dana untuk pendidikan siswa dari hasil isian pertanyaan tertulis kepada siswa dan orang tuanya sedangkan monitoring dari Kementerian Agama Kabupaten kepada sekolah terkait pelaksanaan PIP dalam bentuk laporan secara online dan hardcopy.

3. Evaluasi Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai pada aspek pemanfaatan Program Indonesia Pintar secara keseluruhan termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 86,51%. Aspek pemanfaatan PIP terdiri dari 5 indikator, (a) Indikator Alokasi

penggunaan dan sebesar 78,81%. Sekolah pada tahun ini membuat kebijakan alokasi penggunaan dana PIP dilakukan oleh orang tua dan siswa langsung dengan tujuan untuk pemenuhan biaya pendidikan siswa. (b) Indikator peningkatan akademik sebesar 90,56%, pada motivasi belajar siswa, PIP membuat hasil belajar rapor siswa menunjukkan peningkatan nilai. (c) Indikator keaktifan siswa sebesar 89,17% dengan menurunnya angka ketidakhadiran siswa dalam KBM. (d) Indikator Laporan pelaksanaan PIP didapat laporan online dan tertulis terkait penyerapan dan penerima PIP. (e) Indikator Perubahan Penerima PIP dari sisi tujuan sebesar 87,5%, terjadi perubahan kepada siswa yang memperoleh Program Indonesia Pintar.

4. Faktor Pendukung pemanfaatan Program Indonesia Pintar antara lain: (a) Adanya pendataan awal siswa dari keluarga miskin di awal peserta didik bersekolah. (b) Tim pelaksana PIP yang tidak mengalami pergantian dalam setiap tahunnya. (c) Kebijakan sekolah dalam hal pengelolaan dana PIP agar dapat maksimal dalam pemanfaatannya.
5. Faktor Penghambat pemanfaatan Program Indonesia Pintar antara lain: (a) Kurangnya sosialisasi dari sekolah dan dinas terkait tentang PIP. (b) pemberitahuan informasi yang selalu mundur dari dinas terkait. (c) Waktu pencairan yang tidak sesuai dengan waktu kebutuhan siswa. (d) Tidak adanya monitoring yang maksimal dalam pelaksanaan PIP.

5.2. saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan PIP dapat diajukan beberapa saran, sebagaiberikut:

Bagi Pemerintah

- a. Diharapkan pemerintah memperbaiki pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan membuat petunjuk teknis yang lebih detail terkait pelaksanaan PIP
- b. Lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat terkait tujuan dan pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
- c. Batasan waktu pelaksanaan pada setiap tahap pelaksanaan PIP lebih diperjelas
- d. Merevisi/memperbaiki sistem pengajuan Program Indonesia Pintar sehingga tidak terlalu banyak SK Penetapan Penerima PIP di Sekolah.
- e. Pencairan dana PIP sebaiknya di awal tahun pembelajaran sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa untuk pendidikan.

Bagi Sekolah

- a. Lebih mensosialisasikan lagi kepada siswa dan wali murid terkait tujuan dan pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
- b. Meningkatkan pemahaman siswa dan orang tua terkait pelaksanaan PIP di Sekolah.

Bagi Penerima PIP

- a. Penerima PIP seharusnya lebih aktif dalam mencari informasi dan memahami tujuan Program Indonesia Pintar.

- b. Lebih sering berkomunikasi dengan penyelenggara di sekolah dalam hal pemanfaatan PIP
- c. Informasi yang di dapat dari sekolah segera disampaikan kepada orang tua sehingga maksimal dalam pelaksanaan PIP
- d. Menjalankan kewajiban sebagai penerima



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abidin, 2006, *Kebijakan Publik*, Jakarta;Suara Bebas
- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*(Edisi Revisi), Jakarta :Rineka Cipta,
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Anderson, James E., 1975, *Public Policy Making*. New York: Holt, Renehart and Winston.
- Brinkerhoff, Derick W– Benjamin L. Crosby, 2002, *Managing Policy Reform*, Kumarian Press, USA.
- Dwiyanto, Agus ,2002, *Reformasi Birokrasi Di Indonesia* , Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*,Yogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*,New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congresional Quarter Press.
- Hamzah B. Uno & Satria Koni. (2012). *Assessment Pembelajaran*. Jakarta: BumiAksara.
- Hasan,Hamid. (2008). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun2014 tentang *Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun KeluargaProduktif*. Jakarta.

- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI, *Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2016*.
- Larasati, Dyah & Howel, Fiona .(2014). *Bantuan Siswa Miskin (BSM): Program Bantuan Tunai untuk Siswa-Siswi Miskin Indonesia*. Jakarta: InternationalPolicy Center for Inclusive Growth
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Sage publication Inc, USA.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*,New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Frameworkdalam Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- Marielle Berriet-Slliec, Pierre Labarthe, Catherine Laurent and Jacques Baudry, 17-18 February 2011, *Empirical Validity of The Evaluation and Quality of Evidence*. "International Journal of Sains and Research".
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho D Riant, 2011, *Public policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi RiskManajemen Dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Elex Media Computindo.
- Nugroho D, Riant, 2008, *AnalisisKebijakan Publik*, Malang, Banyu Media.
- Nurgiyantoro, Burhan. (2010). *Penilaian Pembelajaran Bahasa*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Nwagboso,Chris I (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Departement of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State-Nigeria, April 2012, *Public Policy and Challenges of Policy Evaluation in Third World*, "British Journal of Humaniora and Social Science"
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*,New York: Plume Book.

- Osborne Dan Plastrik, 2004, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategic For Reinventing Government*, Addison-Westey Publishing Company, Inc, California
- Suprastowo, Philip, 2014. *Kontribusi Bantuan Siswa Miskin Terhadap Keberlangsungan Dan Keberlanjutan Pendidikan Siswa*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemdikbud
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyatutu, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, 2003, *Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dalam Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Remi dan Tjiptoherijanto, 2003, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta; Elex media Computindo.
- Republik Indonesia, 2003. *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretaris Kabinet RI Republik Indonesia. (2014).
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.
- Sekretaris Kabinet RI Wira Saputra, 2014. *Evaluasi Realisasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2012 di SMK Negeri 1 Sukasada Denpasar*: Undiksha
- Sudijono, Anas. 2011. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Suharno, 2008, *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; UNY Press.
- Sri, Ernawati, (2014). *Implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran 2012/2013 di SMP Negeri 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: UNY
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tayibnapi, Farida Yusuf. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.

- Woleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV.Remaja Rosdakarya.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirawan.(2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers



Lampiran : Instrumen Penelitian

EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH Studi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Lampiran : Satu Berkas

Kepada Yth. Siswa/Siswi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul

Assalamualaikum wr. wb,

Dalam rangka penulisan penelitian Tesis yang berjudul “Evaluasi Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah, Studi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai”, saya sebagai mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, memohon bantuan siswa/siswi untuk mengisi kuesioner/angket yang telah disediakan. Jawaban yang siswa/siswi berikan dijamin kerahasiaannya, karena kuesioner ini semata-mata untuk kepentingan penelitian. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tak ternilai harganya bagi penelitian ini.

Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih.

**Dolok Masihul, Februari 2017
Peneliti,**

(Fitriana Senja)

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER UNTUK SISWA

Ada dua macam cara dalam memberikan jawaban:

1. Untuk pertanyaan pilihan, siswa/siswi dimohon memilih jawaban yang sesuai dengan membubuhkan tanda [/].
2. Apabila siswa/siswi ingin memperbaiki jawaban berilah tanda [=] pada jawaban yang salah dan [/] pada jawaban yang benar.
3. Kuesioner ini memiliki 4 Alternatif Jawaban dengan Keterangan sebagai berikut:
 - 4 : Sangat Setuju/ Selalu**
 - 3 : Setuju/ Sering**
 - 2 : Kurang Setuju/ Kadang-Kadang**
 - 1 : Tidak Setuju/ Tidak Pernah**
4. Instrumen ini berisi pernyataan-pernyataan tentang aspek proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang ada di sekolah siswa/siswi.
5. Mohon mengisi setiap butir pertanyaan dalam kuesioner ini tanpa ada yang terlewatkan. Atas bantuan dan kerjasama siswa/siswi, saya ucapkan terima kasih.

II. KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Nomor responden : (diisi oleh peneliti)
2. Nama :
3. Jenis Kelamin : laki-laki/perempuan*
4. Kelas :
5. Semester :
6. Nama Orang Tua :
7. Alamat Lengkap :

Nb : tanda bintang (*) coret yang tidak perlu

Instrumen Penelitian:**EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH,
Studi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang
Bedagai**

A. PERENCANAAN / PERSIAPAN					
NO	PERNYATAAN / PERTANYAAN	4	3	2	1
1	Saya mendapat informasi Program Indonesia Pintar dari sekolah				
2	Saya mendapat Informasi Program Indonesia Pintar dari Orang lain				
3	Saya berasal dari keluarga miskin pemilik KartuPerlindungan Sosial (KPS)				
4	Saya berhak memperoleh Program Indonesia Pintar karena tahun sebelumnya saya mendapat bantuan siswa miskin				
5	Program Indonesia Pintar hanya untuk membantu siswa dari keluarga miskin				
B. PELAKSANAAN					
NO	PERNYATAAN / PERTANYAAN	4	3	2	1
6	Sekolah memberikan sosialisasi tentang Program Indonesia Pintarsecara langsung ke siswa				
7	Guru menginformasikan PIP kepada seluruh siswa				
8	Sekolah memberikan sosialisasi tentang Program Indonesia Pintar di papan pengumuman				
9	Saya diminta mengajukan PIP oleh sekolah				
10	Saya ikut teman untuk mendaftar PIP				
11	Saya mendapat informasi tentang penetapan penerima Program Indonesia Pintar dari Guru				
12	Penetapan penerima PIP diinformasikan melalui papan pengumuman				
13	Saya memberi tahu orang tua jika saya mendapat Program Indonesia Pintar				
14	Saya mengambil Sendiri dana Program Indonesia Pintar				
15	Saya menyerahkan uang PIP ke Orang tua				
16	Pencairan dana PIP di Awal Semester				

17	Saya melaporkan penggunaan dana PIP kepada Sekolah				
18	Guru mengingatkan pemanfaatan dana PIP				
C. KELUARAN / HASIL					
NO	PERNYATAAN / PERTANYAAN	4	3	2	1
19	Saya dapat menyebutkan/ memahami pemanfaatan penggunaan dana Program Indonesia Pintar				
20	Dana PIP dikelola oleh Orang tua saya				
21	Saya membelanjakan sendiri dana PIP				
22	Saya konsultasi dengan guru untuk pemanfaatan PIP				
23	Saya membeli baju, buku, bolpoint, serta peralatan sekolah dengan dana PIP				
24	Saya diberi uang saku oleh orang tua/wali				
25	Dana transportasi saya kesekolah menggunakan uang PIP				
26	Setelah mendapat bantuan Program Indonesia Pintar saya sangat senang dan semangat belajar				
27	Saya berusaha mengerjakan Tugas Sekolah				
28	Waktu bermain saya berkurang karena untuk belajar				
29	Saya tidak terlambat sekolah				
30	Saya tidak pernah membolos sekolah				
31	Program Indonesia Pintar membantu saya mencapai cita-cita				
32	Saya dapat menyelesaikan sekolah karena mendapat Program Indonesia pintar				

PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SISWA MADRASAH, Studi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Nama :

Jabatan :

Hari, tanggal :

A. Perencanaan

1. Sejak Kapan Program Indonesia Pintar/ Bantuan Siswa Miskin ada di MIN Dolok Masihul?
2. Apakah staff dan guru memahami mengenai tujuan dari Program Indonesia Pintar?
3. Bagaimana pembagian tugas pelaksanaan program indonesia pintar di MIN Dolok Masihul?
4. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan Porgram Indonesia Pintar?
5. Apakah dalam pelaksanaan melibatkan komite sekolah atau Tata Usaha?
6. Apakah tugas dan tanggung jawab Bapak/ Ibu selaku penanggung jawab Program Indonesia Pintar di MIN Dolok Masihul? Bagaimana Pelaksanaannya?
7. Adakah kebijakan atau strategi khusus yang diterapkan oleh sekolah terkait program Indonesia Pintar di Dolok Masihul?

B. Pelaksanaan

1. Bagaimana cara Bapak/ Ibu melakukan Koordinasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
2. Kendala apasaja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Program Indonesia Pintar?
3. Menurut Bapak/ Ibu, sudah efektif dan efisienkah mekanisme pelaksanaan PIP? Mengapa?

C. Sistem Monitoring dan Evaluasi

1. Bagaimana Bapak/ Ibu memantau pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
2. Menurut Bapak/ Ibu, saran dan kritik untuk pemerintah dan sekolah dalam mensukseskan program ini?
3. Bagaimana sekolah dapat mengetahui tanggapan orang tua siswa terkait program PIP?

4. Apakah sekolah pernah mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa terkait PIP? Bagaimana Tanggapan orang tua terhadap adanya program PIP?

D. Aspek Manfaat

1. Apakah Program Indonesia Pintar dapat membantu memenuhi kebutuhan sekolah siswa miskin sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya?
2. Apakah melalui program indonesia Pintar dapat mencegah siswa miskin putus sekolah ataupun dapat menjadi pendorong siswa miskin untuk kembali bersekolah di MIN Dolok Masihul?

Peneliti,

Fitriana Senja

DAFTAR OBSERVASI

Adapun hal-hal yang perlu di observasi adalah :

1. Lokasi penelitian
2. Kegiatan Program Indonesia Pintar di MIN Dolok Masihul
3. Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran Program Indonesia Pintar di MIN Dolok Masihul